



Bergerak dalam Kemelut: Perkembangan Pesantren di Aceh Tengah 1960 – 2000

Moving in Crisis: The Development of Islamic Boarding Schools in Central Aceh 1960 – 2000

M. Dien Madjid¹, Azhar Saleh², Johan Wahyudhi³

^{1 2 3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: dienmadjid49@uinjkt.ac.id, azhar.saleh@uinjkt.ac.id, johan.wahyudi@uinjkt.ac.id

Diterima: 15 Juni 2024 | Direvisi: 18 Juli 2024 | Diterbitkan: 31 Juli 2024

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Pesantren,
Education,
Islam,
Gayo.

This article describes the development of pesantren (or dayah) in Central Aceh in the period 1960-2000. Through pesantren or dayah, Islamic studies were developed to become an important asset for the people of Central Aceh. However, it was not easy to develop this discourse, given the political conditions that were not decisive. The existence of the DI/TII rebellion and the Free Aceh Movement (GAM) disrupted teaching and learning. This study uses desk research to gather some chronological information about the development of pesantren in this region. The results of this study show the transformation of Islamic education, from the previous traditional nuances, namely by referring to classical Islamic books, has changed by adopting the curriculum set by the Indonesian government.

Kata Kunci:

Pesantren,
Pendidikan,
Islam,
Gayo.

Artikel ini menjelaskan tentang perkembangan pesantren (atau dayah) di Aceh Tengah pada periode 1960-2000. Melalui pesantren atau dayah, studi Islam dikembangkan hingga menjadi modal penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Namun, tidak mudah dalam mengembangkan wacana ini, mengingat kondisi politik yang tidak menentukan. Keberadaan pemberontakan DI/TII dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sempat membuat kehidupan belajar dan mengajar terganggu. Studi ini menggunakan riset kepustakaan untuk mengumpulkan sejumlah informasi kronologis tentang perkembangan pesantren di wilayah ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya transformasi pendidikan Islam, dari yang sebelumnya bernuansa tradisional, yakni dengan merujuk kitab Islam klasik, mengalami perubahan dengan ikut mengadopsi kurikulum yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

PENDAHULUAN

Pesantren di Aceh, atau dalam penyebutan lokal disebut dayah, memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam pendidikan dan perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Sejak berdirinya pesantren pertama di Aceh, mereka telah menjadi pusat

pembelajaran agama dan budaya Islam, menyebarkan pengetahuan tentang Al-Qur'an, Hadis, fiqh, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Pesantren di Aceh dikenal karena ketekunannya dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam, serta berperan sebagai pusat dakwah yang signifikan. Selain itu, pesantren di Aceh juga berkontribusi

dalam membentuk karakter dan moral generasi muda melalui pendidikan berbasis akhlak dan etika Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren di Aceh mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam jumlah maupun kualitas pendidikan. Pemerintah daerah dan berbagai organisasi non-pemerintah turut berperan dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan sumber daya di pesantren. Banyak pesantren di Aceh kini tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum umum, seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia modern. Selain itu, pesantren di Aceh juga mulai memperkenalkan program-program keterampilan hidup dan vocational training untuk membekali santri dengan keterampilan praktis yang bermanfaat (Basri, 2022).

Namun, perkembangan pesantren di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah pendanaan yang masih menjadi kendala utama bagi banyak pesantren kecil. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi dan metode pembelajaran modern juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pesantren-pesantren di Aceh. Meskipun demikian, dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta komitmen para pengasuh pesantren, diharapkan pesantren di Aceh dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pendidikan dan pengembangan moral masyarakat Aceh (Asdiana, 2018).

Kehidupan sosial di Aceh Tengah sekitar tahun 1960-an sangat dipengaruhi oleh adat

istiadat dan tradisi yang kuat. Masyarakat Aceh Tengah pada masa itu hidup dalam komunitas yang erat, di mana gotong royong dan rasa kebersamaan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. Kegiatan sosial seperti kenduri, gotong royong dalam pembangunan rumah atau ladang, dan perayaan adat lainnya merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem kekeluargaan dan hierarki adat juga memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial dan struktur masyarakat (Melalatoa, 1982).

Aceh Tengah juga dikenal sebagai wilayah agraris, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian dan perkebunan. Pertanian kopi Gayo menjadi salah satu komoditas utama yang mendukung perekonomian lokal. Kehidupan petani kopi yang bersifat subsisten mencerminkan kemandirian ekonomi dan kerja keras masyarakat. Di samping itu, kegiatan barter masih umum dilakukan, di mana hasil pertanian sering ditukar dengan barang atau jasa lain, menciptakan sistem ekonomi yang saling mendukung di antara anggota komunitas (Latif, 1995).

Keadaan Pendidikan pada tahun sekitar tahun 1960-an, di Aceh Tengah masih terbatas, dengan fasilitas pendidikan yang minim dan akses yang sulit, terutama di daerah-daerah pedalaman. Namun, masyarakat sangat menghargai pendidikan agama, dengan banyak anak-anak yang belajar di madrasah atau pesantren setempat. Pendidikan agama menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, peran ulama dan tokoh agama sangat sentral dalam kehidupan sosial, menjadi

pemimpin spiritual dan penasehat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Latif, 1995).

Selain itu, tahun 1960-an juga ditandai oleh adanya dinamika politik dan konflik yang mempengaruhi kehidupan sosial di Aceh Tengah. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berlangsung pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an meninggalkan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Meskipun demikian, masyarakat Aceh Tengah tetap berusaha mempertahankan tradisi dan harmoni sosial mereka di tengah situasi yang tidak stabil. Kehidupan sosial di Aceh Tengah pada masa itu mencerminkan kekuatan komunitas dan ketahanan budaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan (Munadia dkk, 2022).

Terdapat sejumlah sarjana yang telah mengupas aspek pendidikan Islam dalam masyarakat Gayo atau kondisi pendidikan di Aceh Tengah dalam periode tertentu. Karimi Toweren melihat peran tokoh agama di Aceh Tengah sebagai sosok yang penting dalam memberikan pemahaman Islam di Aceh Tengah, khususnya di Desa Toweren, Takengon. Kertas kerja yang ditulisnya pada 2018 menyoroti peran penting ulama setempat dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat sehingga mereka dapat berperilaku dan mematuhi pedoman serta ajaran Islam yang benar. Salah satu masalah yang muncul di Desa Toweren adalah banyaknya penduduk yang memelihara anjing tanpa mengikuti pedoman syariah dan memahami konsep najis mughallazah (najis yang dianggap haram dalam hukum Islam seperti memegang anjing dan babi) secara

benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, faktor penghambat, dan solusi yang diambil untuk meningkatkan pemahaman agama warga Desa Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah mengenai najis mughallazah dalam konteks pemeliharaan anjing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh agama masih terbatas pada kegiatan umum di komunitas, seperti sholat Jumat, pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan oleh perangkat desa pada Jumat pagi, pembacaan Yasin pada malam Kamis, pengajian pejabat kecamatan setiap tanggal lima belas dalam setiap bulan, memberikan nasihat selama acara tahlilan, dan pengumuman menggunakan pengeras suara masjid. Faktor-faktor penghambatnya mencakup faktor internal seperti latar belakang pendidikan dan perbedaan karakter di antara anggota komunitas, serta faktor eksternal seperti keterbatasan energi, waktu, dana, fasilitas, media, dan program studi fikih, serta kurangnya koordinasi antara tokoh agama dan lembaga pemerintah terkait.

Untuk mengatasi masalah kekurangan sosialisasi najis akibar anjing di atas, beberapa solusi yang diusulkan antara lain meningkatkan frekuensi studi fikih, sosialisasi intensif mengenai konsep najis mughallazah, pelaksanaan program desa sesuai syariah, pembentukan tim khusus untuk menangani masalah yang dihadapi oleh komunitas pemelihara anjing, dan bekerja sama dengan

aparatus desa serta lembaga keagamaan di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk menjadikan kasus ini sebagai prioritas utama. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman agama masyarakat Desa Toweren dan memastikan kepatuhan mereka terhadap pedoman syariah dalam pemeliharaan anjing (Toweren, 2018).

Ulama merupakan sosok utama dalam memberikan pengkajian Islam di tengah masyarakat. Artikel yang diungkapkan oleh Karimi di atas, kendati telah menyentuh aspek aktivitas ulama Aceh Tengah dalam membina masyarakatnya, tidak memuat aktivitas guru agama di pesantren atau dayah yang menjadi fokus dalam kajian tersebut. Meskipun demikian, studinya memberikan perspektif baru tentang kegiatan sederhana dari para ulama yang dikupas secara mendalam dengan penelitian lapangan.

Pada 2019, Ismet Nur menulis disertasi dengan judul "Modernisasi Dayah Di Kabupaten Aceh Tengah". Penelitiannya bertujuan mengeksplorasi modernisasi dayah di Kabupaten Aceh Tengah. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: modernisasi kelembagaan dayah, modernisasi sistem pendidikan dayah, dan apresiasi sosial terhadap modernisasi tersebut. Ismet menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang dilaksanakan di beberapa dayah terpadu seperti Dayah Terpadu Darul Mukhlisin, Dayah Terpadu Ulumul Qur'an, dan Dayah Terpadu Al-Azhar. Data utama penelitian diperoleh dari dokumen serta informasi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dayah, teungku dayah, santri, dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian Ismet menunjukkan bahwa modernisasi kelembagaan dayah di Aceh Tengah ditandai oleh beberapa perubahan signifikan. Perubahan nama dan nomenklatur, restrukturisasi organisasi, dan pola kepemimpinan kolektif adalah beberapa perubahan yang mencolok. Selain itu, penyelenggaraan satuan pendidikan setingkat MTs/SMP dan MA/SMA serta peningkatan akreditasi dayah dengan predikat tipe A memperkuat posisi kelembagaan dayah di wilayah tersebut. Modernisasi ini juga mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas akademik teungku dayah, perubahan dalam pola rekrutmen mereka, serta penambahan jumlah santri yang diterima melalui proses rekrutmen yang lebih terstruktur dan sistematis.

Apresiasi sosial terhadap modernisasi dayah di Aceh Tengah juga menunjukkan perubahan yang dapat diikuti fenomenanya. Dayah-dayah terpadu kini dianggap sebagai benteng pertahanan pendidikan agama bagi masyarakat, serta menjadi institusi kunci dalam mencetak kader ulama dan generasi religius. Minat dan motivasi masyarakat terhadap pendidikan dayah meningkat seiring dengan modernisasi yang terjadi, menunjukkan bahwa masyarakat melihat dayah sebagai institusi yang mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Perubahan ini menguatkan posisi dayah dalam masyarakat dan memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan agama di Kabupaten Aceh Tengah (Ismet Nur, 2019).

Studi Ismet berkontribusi dalam melihat fenomena modernisasi dayah di Aceh Tengah. Tidak bisa dipungkiri, dayah atau pesantren setempat mempunyai motivasi untuk menjadi

lembaga pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk muatan kurikulum yang serupa dengan yang ditemukan pada sekolah non-keagamaan. Peluang ini coba ditangkap oleh sejumlah pesantren dan disesuaikan dengan model pendidikan Islam di pesantren tersebut. Sayangnya, studi Ismet tidak menerapkan pendekatan historis dan kronologis, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian sejarah, sehingga informasi yang ditampilkan, tidak selalu menerapkan model runutan peristiwa yang tegas disertai dengan penempatan waktu yang tertib.

Pada 2020, Ihsan Harun menulis disertasi berjudul "Sejarah Pendidikan Islam di Aceh Tengah Tahun 1910 – 1986". Ia melihat bahwa tradisi belah (suatu identitas kekeluargaan dalam masyarakat Gayo), bentrokan partai politik pada tahun 1946, pemberontakan PKI dan DI/TII, serta kerusuhan politik di Aceh menjadi faktor-faktor yang membentuk dinamika pendidikan Islam di wilayah tersebut. Sejak tahun 1904, masyarakat Gayo mulai mengembangkan perkebunan agraris dan telah menerima Islam melalui para pendakwah Islam sebelumnya. Tradisi akademik seperti perjalanan untuk tujuan pendidikan dan pendirian lembaga pendidikan telah dipraktikkan oleh masyarakat Gayo sebelum era 1910-1986.

Pada periode 1910-1986, terdapat empat tujuan belajar utama bagi santri dari etnis Gayo, yakni Pesantren Pulo Kitun, Pesantren Cut Merak, Sekolah Thawalib dan Pesantren Bangil di Jawa Timur. Keempat lembaga ini menjadi pusat pendidikan Islam yang penting bagi komunitas Gayo, menyediakan pendidikan

agama yang mendalam dan membentuk jaringan pendidikan Islam di Aceh. Jaringan ini dapat ditelusuri kembali ke tokoh-tokoh seperti Teungku Muhammad Saleh, Teungku Muhammad Ali, Teungku Syahbuddin, Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Syekh Ibrahim Musa, dan Syekh Karim Amrullah. Para tokoh ini memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Aceh dan memberikan kontribusi besar bagi generasi Muslim Gayo berikutnya.

Pengaruh para tokoh pendidikan Islam di atas sangat terasa pada generasi berikutnya seperti Teungku Ahmad Damanhuri, Teungku Abdurrahman, Teungku Abdul Djilil, Teungku Ali Djadun, Teungku Mahmud Ibrahim dan Teungku M. Hasan Tan. Mereka melanjutkan tradisi pendidikan Islam yang kuat dan terukur lewat serangkaian metode pendidikan yang terkadang berbeda konsep satu dengan lainnya, memelihara nilai-nilai agama, dan memastikan kelangsungan pendidikan Islam di Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Aceh pada periode 1910-1986 tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial, tetapi juga didorong oleh komitmen kuat dari para pemimpin agama dan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas (Harun, 2020).

Kendati telah menyusun aneka informasi seputar pendidikan Islam di Aceh ke dalam suatu buku, tulisan Ihsan belum merambah ke aspek-aspek pesantren tadisional yang menekankan pada pendidikan klasik bersandarkan pada kajian kitab kuning (kitab yang ditulis oleh ulama klasik yang berasal dari

masa kejayaan intelektual Islam di Abad Pertengahan). Sedangkan kekurangan itu adalah salah satu materi pokok dalam tulisan penulis.

Tulisan ini akan mengarah pada perubahan sosial yang digagas dalam sejumlah pesantren yang dijadikan objek penelitian. Pesantren ini adalah Dayah Terpadu Ulumul Qur'an Quba' Bebesen, Pesantren Terpadu Maqamam Mahmuda, Pesantren Mi'yarul Ulum dan Dayah Mudi Masja (Masjid Jalok). Kedua pesantren pertama berhaluan pesantren modern, sedangkan dua pesantren berikutnya adalah pesantren tradisional.

METODE

Metode penelitian sejarah dalam meneliti perkembangan pesantren di Aceh Tengah antara tahun 1960 hingga 2000 memerlukan pendekatan yang sistematis dan mendalam. Tahap pertama, pencarian sumber, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, arsip pesantren, catatan pribadi tokoh-tokoh pesantren, serta wawancara dengan tokoh agama, pengasuh pesantren, santri senior, dan masyarakat setempat yang menyaksikan perkembangan tersebut. Wawancara menjadi sangat penting untuk mendapatkan perspektif langsung dan informasi yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen tertulis. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang sudah ada tentang pesantren dan pendidikan Islam di Aceh Tengah.

Setelah mengumpulkan sumber-sumber tersebut, tahap berikutnya adalah kritik sumber. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan

keaslian dokumen, seperti memeriksa tanggal, penulis, dan asal dokumen. Kritik internal diperlukan untuk mengevaluasi keandalan isi sumber, mencari bias atau sudut pandang penulis, serta menilai konsistensi informasi yang diberikan. Dalam konteks wawancara, penting untuk menguji keandalan dan kejujuran narasumber, serta memverifikasi informasi yang diberikan dengan sumber lain untuk memastikan akurasi. Tahap kritik sumber ini sangat penting untuk membangun dasar data yang solid dan dapat dipercaya bagi penelitian.

Tahap interpretasi melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi. Peneliti harus menghubungkan berbagai informasi untuk memahami konteks dan dinamika perkembangan pesantren di Aceh Tengah selama periode 1960-2000. Misalnya, peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Aceh yang mempengaruhi pendidikan pesantren. Peneliti juga perlu mengeksplorasi bagaimana konflik internal dan eksternal, serta pengaruh kebijakan pemerintah dan globalisasi, berdampak pada pesantren. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam perkembangan pesantren serta kontribusi mereka terhadap masyarakat Aceh Tengah.

Tahap akhir adalah penulisan sejarah, di mana peneliti menyusun narasi yang koheren dan komprehensif berdasarkan data dan interpretasi yang telah dilakukan. Penulisan ini harus menyampaikan bukan hanya fakta-fakta sejarah, tetapi juga analisis dan interpretasi peneliti tentang makna dan signifikansi perkembangan pesantren di Aceh Tengah. Penulisan yang baik harus mampu

menggambarkan kompleksitas dan dinamika perubahan yang terjadi, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang peran pesantren dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sejarah pendidikan Islam di Aceh Tengah dan menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisa perkembangan pesantren di Aceh Tengah antara tahun 1960 hingga 2000 adalah pendekatan historis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji perubahan dan perkembangan pesantren dalam konteks waktu tertentu, serta memahami dinamika sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pesantren. Dengan menerapkan analisis perubahan sosial di sekitar pesantren, peneliti dapat menelusuri bagaimana institusi ini beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Aceh Tengah. Pendekatan historis juga membantu dalam mengidentifikasi peran pesantren dalam proses transformasi sosial, serta kontribusi mereka dalam membentuk identitas dan struktur masyarakat lokal (Madjid, 2014; Madjid, 2021).

Perubahan sosial di sekitar pesantren atau dayah di Aceh Tengah bertumpu pada program-program yang diterapkan oleh pesantren, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian para santri maupun dalam mempengaruhi perkembangan masyarakat secara umum. Program-program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan para santri

mencerminkan upaya pesantren dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pesantren juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial melalui kegiatan dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Dengan demikian, perubahan sosial yang terjadi di sekitar pesantren tidak hanya mencerminkan adaptasi internal institusi tersebut, tetapi juga menunjukkan dampak luas yang dimiliki pesantren terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tengah secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menginjak 1953, surat kabar Java Bode mengabarkan bahwa pasukan nasional Indonesia telah masuk ke wilayah Takengon, Blangkejeren dan Kutacane. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Gayo. Merela ditugaskan untuk mengusahakan keamanan dari ancaman pemberontakan DI/TII. Dikabarkan para petani mulai datang ke sawah-sawah mereka untuk mengolah tanaman padinya di bawah pengamanan pasukan Indonesia (Java Bode, edisi 12 Oktober 1953).

Di Kutacane, pasukan Indonesia mulai mendorong masyarakat Gayo dengan cara membuka sekolah negeri dan swasta. Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah Islam atau pengajian dan dayah juga ikut dibuka. Pemerintah menginginkan keadaan keamanan yang terdistribusi dengan baik, mengingat perang sipil, hanya akan menciptakan ketakutan bagi masyarakat yang menyebabkan semua

sendi kehidupan tidak berjalan (Java Bode, edisi 12 Oktober 1953).

Dalam suatu pemberitaan, Ferdinand Lumban Tobing, seorang tokoh masyarakat Sumatra Utara menjelaskan banyak doktor dan guru yang mengungsi ke Medan akibat adanya pemberontakan DI/TII. Dilaporkan terdapat empat dokter asing yang bertugas di wilayah Aceh, yakni di Takengon, Langsa, Kuala Simpang dan Kotaraja. Keadaan ini kerap membuat masyarakat terpecah. Bahkan tidak jarang, oleh sebab ketakutan, sejumlah masyarakat di Aceh mendukung pasukan pemberontak (*Indische courant voor Nederland*, edisi 14 Oktober 1953).

Diketahui bahwa sejak 1941, sudah berdiri Sekolah Rakyat Islam (SRI) di Takengon yang dipimpin oleh Banta Cut. Dalam kaca mata pengurusan pendidikan Hindia Belanda sekolah ini termasuk Sekolah Kelas Dua (*De Indische courant*, edisi 12 Agustus 1941). Pada perkembangannya, pada 1957, SRI ini menjadi Sekolah Rakyat Islam Negeri (SRIN). Lokasinya terletak di Kampung Kenawat, dekat Danau Laut Tawar.

Perkembangan pendidikan Islam di Aceh Tengah mengalami gangguan signifikan akibat pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada sekitar tahun 1960-an. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang berdampak langsung pada operasional pesantren dan madrasah. Banyak lembaga pendidikan Islam terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar akibat ancaman kekerasan, perekrutan paksa, dan pengungsian massal penduduk. Para pengajar dan santri tidak hanya menghadapi ancaman fisik tetapi juga harus beradaptasi dengan

ketidakpastian yang berkepanjangan. Infrastruktur pendidikan pun mengalami kerusakan, yang pada gilirannya menghambat proses belajar mengajar dan perkembangan intelektual di kawasan tersebut (Muhajir, 2016).

Gangguan terhadap pendidikan Islam di Aceh Tengah semakin diperburuk oleh munculnya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1975-an. Konflik bersenjata yang melibatkan GAM dan pemerintah Indonesia membawa dampak yang lebih luas dan berkepanjangan dibandingkan dengan pemberontakan DI/TII. Kekerasan dan ketidakamanan menyebabkan banyak sekolah dan pesantren harus ditutup atau beroperasi dengan sangat terbatas. Selain itu, perhatian pemerintah dan masyarakat yang lebih difokuskan pada masalah keamanan dan stabilitas politik mengakibatkan minimnya dukungan dan sumber daya untuk sektor pendidikan. Kondisi ini memaksa banyak lembaga pendidikan Islam di Aceh Tengah untuk berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah situasi yang sangat tidak kondusif (Jayanti, 2013).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan berat, pendidikan Islam di Aceh Tengah berhasil menunjukkan ketahanannya. Dalam banyak kasus, pesantren dan madrasah menjadi tempat perlindungan dan stabilitas bagi masyarakat yang terdampak konflik. Tokoh-tokoh agama dan pengelola pesantren berperan penting dalam menjaga semangat belajar dan keberlanjutan pendidikan di tengah situasi krisis. Mereka mengembangkan strategi untuk tetap menjalankan pendidikan, baik melalui pengajaran informal di rumah-rumah atau memindahkan kegiatan belajar mengajar ke

lokasi yang lebih aman. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Islam di Aceh Tengah mengalami gangguan serius akibat konflik, komitmen untuk menjaga dan mengembangkan pendidikan tetap kuat, yang pada akhirnya membantu memulihkan dan memperkuat sistem pendidikan setelah masa-masa krisis tersebut.

Dari penelidikan awal ditemukan sejumlah serpihak informasi mengenai rekam jejak pesantren di Aceh Tengah sekitar 1960. Masjid Raya Bebesen yang terletak di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah menyelenggarakan suatu pengajian yang rutin diselenggarakan untuk anak-anak. Pengajian di sini memang belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai dayah, dikarenakan sejumlah santrinya akan pulang ke rumah masing-masing setelah pengajian usai. Jadi konsep pengkajian agama ini di sini lebih mengarah ke pendidikan diniyah sebagaimana yang ditemukan di Jawa.

Namun terdapat satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Masjid Bebesen ini menjadi salah satu tipologi pesantren di Aceh Tengah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Yayasan Quba' Bebesen. Yayasan ini mengelola manajemen pengajaran Islam di Masjid Bebesen. Pada 1965, saat terjadi kerusuhan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh Tengah, masjid ini dibakar, sehingga kegiatan belajar dan mengajar sempat terhenti.

Kemudian, para pengurus Yayasan Quba' Bebesen mulai menginisiasi lembaga pendidikan baru untuk menampung sejumlah santri yang masih ingin belajar di Masjid Bebesen. Belum diketahui secara pasti bagaimana proses belajar dan mengajar yang

dikelola oleh yayasan ini hingga pada 8 Agustus 1990, yayasan ini mendirikan Dayah Terpadu Ulumul Qur'an Quba' (berikutnya Dayah Quba'). Kendati demikian, proses pendaftaran santri baru mulai dilaksanakan pada 1 Juni 1991. Lokasi pendirian dayah ini masih berada di Kecamatan Bebesen.

Pada perkembangannya, pesantren ini memilih untuk memadukan model klasikal dan modern. Hal tersebut tidak terlepas dari tantangan zaman, yakni kebutuhan akan konsep pendidikan Islam yang lengkap, bukan hanya mengkaji ilmu Al-Quran dan hadis serta cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya, namun juga ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, Bahasa Inggris dan yang lainnya. Dayah ini kemudian membuka pendidikan Madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah (Ismet Nur, 2019).

Penerimaan pengurus Dayah Quba' terhadap aneka ilmu pengetahuan umum merupakan salah satu revolusi tersendiri. Hal ini mengingat tidak mudah menerima unsur baru sebagaimana yang ditemukan dalam pesantren-pesantren tradisional. Adanya kepercayaan lama bahwa ilmu agama lebih tinggi dan lebih mulia daripada ilmu pengetahuan umum, menjadi salah satu kendala sejumlah ulama tua tidak mau memperbaharui kurikulum pesantrennya.

Pesantren Maqamam Mahmuda merupakan salah satu pesantren modern lainnya di Aceh Tengah. Pesantren ini berada di bawah pengelolaan Yayasan Maqamam Mahmuda yang berdiri pada 5 Agustus 1998. Pada 2011, Pesantren ini mendapat bantuan dari Pemerintah Aceh untuk pembangunan sejumlah ruang kelas dan bangunan asrama. Semula

pesantren ini lebih mengandalkan pada model pendidikan dayah tradisional. Namun menginjak 2015, pesantren ini sudah mempunyai Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (MA) (Monograf Pesantren Maqamam Mahmuda).

Yang menarik, adalah kegigihan Pesantren Maqamam Mahmuda dalam mencanangkan program literasi. Para pimpinan yayasan mempunyai komitmen untuk menjadikan pesantren ini sebagai pusat literasi Aceh Tengah. Oleh sebab itu, mereka mendorong santri, guru serta penulis Aceh Tengah untuk menulis buku-buku seputar sejarah dan budaya orang Gayo atau Aceh Tengah secara umum. Sejumlah buku-buku yang diterbitkannya berguna untuk menambah perbendaharaan informasi sejarah dan budaya Aceh Tengah. Suatu buku yang berjudul *Konstruksi Jejaring Pendidikan Islam Gayo Era Tahun 1910 – 1986* (terbit 2021) yang ditulis oleh Ihsan Harun misalnya, tidak lepas dari dukungan Yayasan Maqamam Mahmuda. Buku ini mengisi kelangkaan literatur tentang sejarah pendidikan Islam, khususnya pesantren dan dayah, di Aceh Tengah.

Salah satu program inovatif Pesantren Maqamam Mahmuda adalah pendirian monumen di tempat-tempat bersejarah di sekitar Aceh Tengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejarah masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat identitas budaya dan agama. Dengan mendirikan monumen, pesantren berupaya memberikan penghargaan terhadap peristiwa dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Aceh Tengah, yang sering kali terlupakan atau tidak dikenal oleh generasi muda. Monumen tersebut berfungsi sebagai

peringat visual dan edukatif, yang tidak hanya mempercantik lingkungan tetapi juga menjadi titik fokus untuk pendidikan sejarah dan kebanggaan lokal. Melalui upaya ini, pesantren mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengenang dan mempelajari masa lalu (Wawancara dengan Teungku Abdiansyah Linge, kepala pengasuh Pesantren Maqamam Mahmuda, 16 Mei 2024).

Kegiatan mendirikan monumen ini juga merupakan manifestasi dari perubahan sosial yang diinisiasi oleh pesantren. Dengan mengajak masyarakat untuk menghormati dan mengenang sejarah melalui monumen atau prasasti, Pesantren Maqamam Mahmuda menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan religius yang kuat. Ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif dan solidaritas di antara masyarakat. Program ini menunjukkan bagaimana pesantren dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang signifikan, yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama dan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan identitas komunitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkaya dimensi spiritual dan edukatif pesantren, tetapi juga memperkuat peran pesantren sebagai pusat kebudayaan dan pemersatu masyarakat di Aceh Tengah (Monograf Pesantren Maqamam Mahmuda).

Kesadaran untuk membangun monumen di tengah masyarakat Gayo dapat dimaknai sebagai pengejawantahan sejarah publik yang memiliki makna mendalam. Monumen berfungsi sebagai simbol konkret dari memori kolektif dan identitas budaya masyarakat, yang merangkum peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang telah

berkontribusi terhadap sejarah lokal. Di masyarakat Gayo, monumen ini menjadi alat penting dalam menghubungkan generasi muda dengan warisan leluhur mereka, memperkuat rasa memiliki terhadap sejarah dan budaya mereka. Monumen tidak hanya mengingatkan masyarakat tentang masa lalu mereka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, keberadaan monumen ini membantu menciptakan ruang publik di mana sejarah tidak hanya dipelajari tetapi juga dihormati dan dijadikan bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, inisiatif membangun monumen di Gayo juga mencerminkan usaha masyarakat untuk mengartikulasikan dan mengafirmasi identitas mereka dalam konteks yang lebih luas. Monumen sebagai wujud sejarah publik memainkan peran penting dalam dialog antara masa lalu dan masa kini, serta antara masyarakat lokal dan global. Melalui monumen, masyarakat Gayo dapat memperkenalkan dan mempromosikan sejarah dan budaya mereka kepada dunia luar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kebanggaan dan martabat komunitas. Hal ini juga mendorong pelestarian budaya dan sejarah lokal di tengah arus globalisasi yang sering kali mengancam keberadaan identitas lokal. Dengan demikian, pembangunan monumen bukan hanya tindakan menghormati masa lalu tetapi juga strategi aktif dalam melestarikan dan memperkuat identitas budaya Gayo di masa kini dan mendatang.

Pesantren Mi'yarul Ulum yang terletak di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, menjadi salah satu pesantren yang masih

mempertahankan sistem tradisional. Sistem pendidikan ini mengacu kepada sejumlah penanda seperti masih dipertahankannya sistem pengajaran ilmu agama berdasarkan metode halakah. Metode ini berupa sekumpulan santri yang mengkaji kitab kuning atau membahas suatu permasalahan agama dengan dipandu oleh teungku, guru agama atau santri senior. Kitab kuning yang digunakan biasanya adalah kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama terdahulu yang hidup di Abad Pertengahan. Kendati materi yang terkandung didalamnya tidak berubah, namun kalangan pesantren masih meyakini bahwa ajaran tersebut masih relevan diterapkan dengan kondisi umat Islam dewasa ini.

Para pengurus pesantren Mi'yarul Ulum tidak serta merta mendorong para santrinya untuk menekuni ilmu agama semata. Mereka mendorong santrinya untuk menekuni bidang agrobisnis di masa depannya, dengan cara pembelajaran seni bercocok tanam dan berkebun. Di samping itu, para santri juga diajarkan cara beternak yang baik mulai dari ternak ikan, ayam maupun bebek. Di samping itu, para santri juga diajarkan servis komputer maupun elektronik. Dari kegiatan ini, diharapkan selain berdakwah, para santri kelak mempunyai keahlian yang dapat dikembangkan sebagai bekal saat mereka sudah berkeluarga (Monograf Pesantren Mi'yarul Ulum).

Dalam konteks perubahan sosial, Pesantren Mi'yarul Ulum telah menapaki gagasan untuk memberikan keahlian tambahan bagi para santrinya. Tidak menutup peluang, apabila sudah lulus dari pesantren, mereka dapat berkarya dan membuka peluang usaha di

bidang elektronik maupun agrobisnis. Ini sejatinya merupakan suatu pantulan paradigma pesantren tradisional yang tidak lazim.

Pesantren Budi Mesja (Mesjid Jaluk), yang terletak di Kecamatan Ketol, merupakan salah satu pesantren tradisional lainnya, yang menerapkan sistem pendidikan tradisional. Saat berkunjung ke sana, penulis melihat sejumlah santri yang membawa kitab kuning. Ini merupakan tanda bahan ajar yang digunakan di pesantren klasik. Bangunan pesantren ini sudah dibuat dengan material yang solid, khususnya di bagian kantor pengurus dan sejumlah kelas. Namun untuk bangunan aula, masih dibangun dengan material sederhana yakni kayu dan atap yang terbuka dengan sedikit pilar penopang dari beton. Meskipun demikian, ruang serba guna ini menempati lahan yang cukup luas, cukup diisi oleh 300 sampai 400 orang (Wawancara dengan Teungku Hafifuddin, pengasuh Pesantren Budi Mesja (Mesjid Jaluk), pada 15 Mei 2024).

Terdapat nama pesantren yang sama dengan yang ditemukan di wilayah Aceh lainnya yakni di Lamno. Dalam suatu acara, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pesantren Budi Mesja mendapat karangan bunga dari suatu pesantren dengan nama yang sama. Ini mengindikasikan adanya hubungan langsung maupun tidak langsung kedua pesantren tersebut. Belum diketahui secara mendalam, bagaimana hubungan mereka.

Pesantren ini juga melakukan aneka kegiatan tarekat Naqsyabandiyah, salah satunya adalah kegiatan zikir berjamaah. Diketahui bahwa tarekat yang berkembang adalah Naqsyabandiyah yang terhubung dengan Syekh

Muda Waly, ulama Aceh kenamaan pada abad 19.

KESIMPULAN

Artikel ini mengeksplorasi evolusi institusi pendidikan Islam di Aceh Tengah dalam konteks sejarah lokal selama empat dekade. Dalam periode ini, pesantren mengalami transformasi signifikan dalam struktur, kurikulum, dan peran sosial. Awalnya, pesantren di Aceh Tengah didirikan dengan tujuan utama mengajarkan ilmu agama secara tradisional. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan politik, pesantren mulai mengadopsi pendekatan yang lebih modern dalam pengajaran, termasuk memasukkan pelajaran umum dalam kurikulumnya. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan internal komunitas, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah yang mendorong integrasi pendidikan agama dan umum.

Selama rentang waktu 1960 hingga 2000, pesantren di Aceh Tengah memainkan peran kunci dalam mempertahankan identitas budaya dan religius masyarakat setempat. Pesantren menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan moral yang penting, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Mereka juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap pengaruh eksternal yang dianggap dapat mengikis nilai-nilai lokal. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun pesantren menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi dan perubahan sosial, mereka berhasil beradaptasi dan terus berkontribusi pada perkembangan sosial dan pendidikan di Aceh Tengah. Kesimpulannya, perkembangan

pesantren di Aceh Tengah merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan keagamaan mereka.

Tengah." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1.2 (2018): 258-272.

Wawancara dengan Teungku Abdiansyah Linge, kepala pengasuh Pesantren Maqamam Mahmuda, 16 Mei 2024.

Wawancara dengan Teungku Hafifuddin, pengasuh Pesantren Budi Mesja (Mesjid Jaluk), pada 15 Mei 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdiana, Asdiana. "Implikasi Pembiayaan Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Mtss di Ponpes Modern Maqam Mahmuda Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal As-Salam* 2.3 (2018): 25-33.
- Basri, Basri. "Eksistensi Dayah di Aceh Masa Kolonialisme Sampai Orde Baru (1900-1998)." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* (2022): 61-76.
- De Indische courant, edisi 12 Agustus 1941
- Harun, Ihsan. *Sejarah Pendidikan Islam di Aceh Tengah Tahun 1910 – 1986*, Disertasi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Indische Courant voor Nederland, edisi 14 Oktober 1953
- Jayanti, Kurnia. "Konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta tahun 1976-2005." *Buletin Al-Turas* 19.1 (2013): 49-70.
- Java Bode, edisi 12 Oktober 1953
- Latif, Ar. *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*, Bandung: Kurnia Bupa, 1995.
- Madjid, M. Dien dkk. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Metode Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Melalatoa, MJ. *Kebudayaan Gayo*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Monograf Pesantren Maqamam Mahmuda.
- Monograf Pesantren Mi'yarul Ulum.
- Muhajir, Azis. "Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan Di/Tii Aceh." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4.1 (2016).
- Munadia, Indah, and Mawardiy Umar. "Strategy in Resolving the DI/TII Rebellion in Aceh, 1953-1959." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 5.1 (2022): 1-13.
- Nur, Ismet. *Modernisasi Dayah Di Kabupaten Aceh Tengah*, Disertasi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Toweren, Karimi. "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh